

MENGEJAR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI SAPI: JANGAN SAMPAI MENGORBANKAN MASA DEPAN PETERNAKAN



<https://belitung.tribunnews.com>

VICTORYNEWS.ID - Peningkatan PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT sebesar Rp877 juta lebih pada tahun 2024 dari Disnak Keswan TTS patut diapresiasi. Kontribusi terbesar berasal dari sektor peternakan, khususnya dari pengiriman sapi antarpulau ke luar NTT. Di kabupaten Kupang, upaya menaikkan retribusi pengiriman sapi untuk peningkatan PAD menghadapi tantangan tata kelola sektor peternakan yang profesional melalui arahan untuk perbaikan sistem pengiriman sapi. Di balik berbagai capaian dan langkah antisipatif yang ada, terdapat satu persoalan krusial yang selalu saja luput dari perhatian untuk diwaspadai yaitu: penurunan populasi dan kualitas genetik sapi lokal. Dalam diskusi dan tukar pikiran bersama dosen prodi peternakan Universitas Nusa Cendana, Dr Gusti Jelantik dan Dr Imanuel Benu, penurunan populasi dan kualitas genetik sapi lokal patut mendapat perhatian. NTT dikenal sebagai lumbung ternak nasional, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, jumlah dan mutu sapi potong menurun akibat pengiriman besar-besaran tanpa dibarengi program regenerasi yang memadai. Populasi sapi terus berkurang, kualitas genetik stagnan dan produktifitas peternakan rakyat tetap rendah. Ini bukan semata akibat tingginya permintaan pasar luar, tetapi juga karena kurangnya sistem pengelolaan ternak yang terencana dan terukur di tingkat peternak. Sayangnya, paradigma peternakan di NTT masih bertumpu pada model ekstensif: sapi dilepas dan dijual saat butuh uang atau pada saat ada permintaan. Sementara, negara-negara dengan industri peternakan maju seperti Australia dan Brasil menerapkan sistem intensif dan terintegrasi mulai dari manajemen reproduksi, pakan berbasis nutrisi, pencatatan data ternak, hingga diversifikasi produk (kulit, pupuk, susu dan lainnya). Inilah yang belum banyak diterapkan oleh peternak kita.

Peningkatan PAD seharusnya tidak sekadar dilihat dari sisi angka pendapatan tahunan. Kita juga perlu menghitung biaya ekologis dan sosial jangka panjang dari praktik pengantarpulau/ekspor ternak tanpa kontrol. Jika populasi ternak terus menurun, maka 5 - 10 tahun ke depan, kita bukan hanya kehilangan sumber PAD, tetapi juga kehilangan identitas sebagai daerah peternakan unggulan. Kita perlu menerapkan strategi ganda: tetap menjaga arus pengantarpulau sapi secara profesional dan legal, sambil memperkuat kapasitas reproduksi, kualitas genetik dan sistem pembibitan lokal. Pemerintah daerah mesti mendorong pembentukan koperasi peternak berbasis kecamatan, memperkuat penyuluhan dan mulai mengintegrasikan data ternak berbasis digital. Peternakan adalah aset jangka panjang. Menjual sapi memang menghasilkan PAD hari ini, tapi membangun sistem peternakan yang kokoh akan memberi kesejahteraan berkelanjutan di masa depan. Tergiur angka PAD sesaat hanya menciptakan perayaan mundurnya sektor peternakan kita sendiri.

Sumber Berita:

<https://www.victorynews.id/opini/33114966016/mengejar-pad-dari-sapi-jangan-sampai-mengorbankan-masa-depan-peternakan>, 16 April 2025

Catatan:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB.³ Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.⁴ Jenis Pajak PKB; BBNKB; PAB; PAP; PBB-

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 20

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 21

³ *Ibid.* Pasal 4, Ayat 1

⁴ *Ibid.* Pasal 4, Ayat 2

P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Jenis Pajak PBBKB; Pajak Rokok; Opsen Pajak MBLB; BPHTB; PBJT; Pajak MBLB; dan Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak PKB; BBNKB; PAB; PAP; PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak PBBKB; Pajak Rokok; Opsen Pajak MBLB; BPHTB; PBJT; Pajak MBLB; dan Pajak Sarang Burung Walet antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah. Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁶ Jenis Retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/ atau perizinan. Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.⁷ Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi: pelayanan kesehatan; pelayanan kebersihan; pelayanan parkir di tepi jalan umum; pelayanan pasar; dan pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak

⁵ *Ibid.* Pasal 5

⁶ *Ibid.* Pasal 1, Ayat 22

⁷ *Ibid.* Pasal 87

mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: persetujuan bangunan gedung; penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat. Retribusi persetujuan bangunan gedung merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing. Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.⁸

Catatan Akhir :

1. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸ *Ibid.* Pasal 88, Ayat 1 s/d 7